

## **BAB III**

### **DINAMIKA AKTIVITAS BHAYANGKARI**

#### **A. Pengantar**

Organisasi Bhayangkari merupakan organisasi formal yang dibentuk oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Pada umumnya sebuah organisasi memiliki struktur organisasi, kepemimpinan, dan kepengurusan atau seksi disegala bidang yang menjadi lingkup kerjanya. Dan anggota-anggota organisasi yang menjalankan berbagai macam kegiatan yang telah disusun oleh kepengurusan. Dibawah pimpinan Jendral atau Kapolri, Bhayangkari mendapat apresiasi untuk dapat menjalankan kegiatan sosialnya.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab I, sub bab sistematika Penelitian, babIII ini akan berisikan tentang temuan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun metode Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Bhayangkari. Seperti contohnya, kegiatan berupa kunjungan-kunjungan ke panti-panti, pelatihan pembentukan *skill* (keahlian), pelatihan *table manner* dan hal lainnya. Hal ini dilakukan melalui serangkaian susunan rencana yang di bentuk oleh kepengurusan.

## **B. Bhayangkari dengan Kegiatannya**

Pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa organisasi Bhayangkari memiliki berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang akan diambil dalam tema penelitian ini adalah kegiatan yang memiliki basis pemberdayaan. Peneliti tertarik mengambil tema tersebut karena dilihat dari pengamatan peneliti memiliki manfaat yang banyak apabila dikaji lebih dalam lagi.

Banyaknya masalah sosial yang ada saat ini membuat peneliti memilih tema pemberdayaan yang dilakukan oleh salah satu organisasi yang disahkan oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Bhayangkari dengan segenap aktivitasnya memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Namun dalam bab ini peneliti tidak berbicara tentang kekurangan dan kelemahan melainkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi formal Kepolisian ini.

Menurut data yang didapat dari kepengurusan pusat Bhayangkari bertempat di Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) yang bertempat di jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, data tahun 2009. Bhayangkari memiliki Yayasan Kemala Bhayangkari dengan ruang lingkup bidang pendidikan memiliki 524 Sekolah Taman Kanak-kanak, 27 Sekolah Dasar, 19 Sekolah Menengah Pertama, 10 Sekolah Menengah Atas, 4 Sekolah Menengah Kejuruan, 4 Sekolah Luar Biasa, dan 1 unit Panti Asuhan.

Peran istri-istri Polisi ini sangatlah penting dalam mencapai kesuksesan setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan negara. Tidak hanya mengurus pekerjaan rumah tangga, anak dan suami. Namun sejak dibeberikannya Bhayangkari tidak pernah absen dalam mengusahakan kesejahteraan anggota Polri. Selain itu, Bhayangkari juga telah melakukan tugas sosial sebagai pengabdiaanya kepada masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatannya Bhayangkari tidak berjalan sendirian selain didukung oleh Institusi Kepolisian, juga mendapat dukungan dari Ibu negara, Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono yang memberikan bantuan kepada Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Sulawesi Tengah dan Polda Papua. Bantuan itu berupa satu unit mobil pintar, motor dan rumah pintar yang turut mencerdaskan anak bangsa.<sup>1</sup>

**Gambar 3.1**  
**Mobil Pintar**



*Dokumentasi : Kompas.com<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Dikutip dari majalah Kemala Bhayangkari, "Silaturahmi Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono Dengan Keluarga Besar Bhayangkari". Hal 20. Edisi 127, Maret 2009.

<sup>2</sup> Di kutip dari kompas.com, berita yang dimuat tanggal 10 November 2008.

Mobil pintar, di rancang khusus, tidak hanya menyediakan buku bacaan, namun juga dilengkapi dengan permainan edukatif, audiovisual, serta computer. Setelah mobil pintar, lahirlah motor pintar. Dengan konsep untuk menjangkau daerah yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Kemudian muncullah rumah pintar yang juga menyediakan latihan keterampilan bagi ibu-ibu yang mengantarkan anaknya kerumah pintar.

**Gambar 3.2**  
**Ibu Ani Bambang Yudhoyono Meresmikan Mobil Pintar**



*Dokumentasi : [abrord/presidensby.info](http://abrord/presidensby.info)<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Situs Web Ibu Negara Republik Indonesia, <http://www.presidentri.go.id/ibunegara/index.php/galeri/album/thumb/detail/203/1146/> di kutip tanggal 15 Oktober 2011

Bisa di lihat pada gambar diatas perpustakaan mobil keliling ini di resmikan oleh Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono di tengah-tengah silaturahmi dengan Bhayangkari dan Keluarga Besar Mabes Polri di Jakarta.

Tidak hanya di bidang pendidikan saja Bhayangkari bergerak tetapi juga melingkupi bidang sosial seperti misalnya gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon pada tahun 2008, dan juga masih dengan tema *go green* Bhayangkari mempunyai kegiatan dalam hal pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ini dalam hal lingkungan ingin memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat.

**Gambar 3.3**  
**Kegiatan Tanam Pohon Oleh Anggota Bhayangkari**



*Dokumentasi : Bhayangkari Ranting Depok*

Sebanyak 130 ibu-ibu Bhayangkari ngumpul untuk melakukan kegiatan tanam pohon. Ibu-ibu ini sangat antusias saat menanam pohon itu, meskipun usia sudah tidak muda lagi. Tiga puluh pohon jenis alpukat, trembesi, rambutan, dan mahoni mereka ditanam.

Kegiatan menanam pohon dalam tema *go green* ini dilakukan tidak hanya di daerah ibukota saja. Tetapi juga di daerah daerah lain yang memiliki banyak lahan untuk mendukung kegiatan menanam pohon. Kegiatan gerakan perempuan tanam danelihara pohon untuk konservasi air di lingkungan merupakan salah satu tindak lanjut dari program Bhayangkari dalam fungsinya guna menghijaukan Indonesia serta untuk menyejukkan bumi agar terhindar dan juga mengurangi pemanasan global juga sebagai pencegahan longsor.

Bidang sosial tidak hanya lingkup lingkungan saja. Tetapi juga Bhayangkari peduli masyarakat. Pada cabang Bantul Bhayangkari kembangkan pasyandu lansia. Kegiatan yang sifatnya sosial seperti peduli dengan keadaan keluarga anggota yang tertimpa musibah seperti sakit, meninggal dunia dan permasalahan masyarakat lainnya.

**Gambar 3.4**  
**Kunjungan Kepada Anggota Bhayangkari yang Terkena Musibah**



*Dokumentasi : Majalah Kemala Bhayangkari.*

Kegiatan sosial dengan tema berbagi kasih telah dilakukan, antara lain pada tanggal 29 September 2008 diberikan bantuan ada balita yang kekurangan gizi di kecamatan Pundang Bantul, mengunjungi SLB di Kecamatan Panjangan, memberikan tali kasih kepada janda dan duafa di kecamatan Panjangan dan iyungan.<sup>4</sup>

Tidak hanya membuat posyandu lansia tetapi juga Bhayangkari melakukan bhakti sosial dimana para anggota Bhayangkari memberikan santunan kepada para korban bencana alam. Santunan yang diberikan merupakan hasil dari dana yang di kumpulkan oleh anggota Bhayangkari.

Bidang pemberdayaan Bhayangkari banyak membantu anggotanya dalam mengasah *skill* atau kemampuan para anggota bahayangkari. Seperti yang kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Bhayangkari Oku, Sumatera Selatan, pada bulan Oktober 2009. Pada kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan cara memanfaatkan lahan kosong dan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai jual.

---

<sup>4</sup> Data kepengurusan Bhayangkari Pusat Mabes Polri, Tahun 2008.

**Gambar 3.4**  
**Kegiatan Bazaar Anggota Bhayangkari**



*Dokumentasi : Majalah Kemala Bhayangkari*

Disaat isu *global warming* dan *green environment* menggugah kesadaran pengurus dan anggota Bhayangkari untuk mengupayakan sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai jual. Berbagai macam jenis sampah bisa dimanfaatkan, seperti kaca plastik pembungkus, kemasan deterjen. Berbagai kreasi yang dihasilkan dari sampah plastik.



**Gambar 3.5**  
**Hasil Kreasi Dari Limbah Rumah Tangga Anggota Bhayangkari**



*Dokumentasi : Majalah Kemala Bhayangkari*

Gambar diatas tersebut merupakan hasil dari kreasi yang di ciptakan oleh anggota Bhayangkari dengan sampah plastik yang dibuatnya. Hasil dari sampah plastik, dapat di kreasikan menjadi bunga dari botol plastic satu literan, tirai dari gelas plastic, sandal dan tas dari bekas odol, dan tas dari bungkus kopi. Hasil ini di pameran dengan mengikuti bazaar dan pameran atau di titipkan di kantor Pengurus Daerah Bhayangkari.

Penelitian yang telah dilaksanakan selama ini, peneliti mendapatkan rencana kerja Bhayangkari yang telah tersusun untuk tahun 2011-2015. Bhayangkari yang termasuk sebagai organisasi kemasyarakatan yang verdasarkan Pancasila, menyadari akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk membantu menyukseskan visi dan misi

Polri kedepan sesuai kebijaksanaan dan strategi dinas Polri serta mewujudkan cita-cita dan tujuam bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan lingkungan masyarakat yang dinamis, maka tantangan yang dihadapi Bhayangkari akan semakin kompleks dan bervariasi dalam upaya melaksanakan tugas pokoknya. Rencana kerja ini dijadikan pedoman penyusun program kerja Bhayangkari disemua tingkat kepengurusan yang meliputi bidang organisasi, ekonomi, kebudayaan, sosial, secara tertib terarah dan teratur agar tercapai suatu program kegiatan yang bertahap dan berkesinambungan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

**Tabel 3.1**

**Rencana Kerja Bhayangkari Tahun 2011-2015**

<b>No.</b>	<b>Bidang Kegiatan</b>	<b>Rencana Kerja</b>	<b>Program Kerja</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Bidang Organisasi	a. Urusan Organisasi	1. Memantapkan pembinaan organisasi secara teratur dan berlanjut dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan berorganisasi. 2. Memberikan tanda penghargaan kepada anggota Bhayangkari. 3. Melaksanakan pembinaan anggota sevara berlanjut serta menangani hal-hal yang berkaitan dengan larangan, sanksi da rehabilitasi anggota. 4. Menyiapkan bahan untuk pengendalian dan pembinaan organisasi secara teratur dan terarah dengan menyiapkan surat-surat yang bersifat mengatur. 5. Menyiapkan calon pengurus Bhayangkari, maupun	

			<p>organisasi kemasyarakatan wanita lain.</p>	
		b. Urusan Penerangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebar luaskan informasi tentang kegiatan organisasi melalui penerbitan brosur, lembaran informasi, DVD. Website, Email, majalah dan media massa lainnya sebagai sarana komunikasi.</li> <li>2. Bekerja sama dengan Div Humas Polri untuk lebih memperluas informasi.</li> <li>3. Menghimpun dokumentasi kegiatan Bhayangkari.</li> </ol>	
		c. Urusan Hubungan Luar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin hubungan kerja sama dengan KOWANI dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai satu tujuan.</li> <li>2. Mempersiapkan anggota yang akan mewakili Bhayangkari dalam pelaksanaan tugas diluar organisasi</li> <li>3. Mendata, memantau dan menghimpun laporan anggota yang ditugasi diluar organisasi Bhayangkari.</li> <li>4. Meneruskan petunjuk serta kebijaksanaan dan kerja sama dengan organisasi/instansi terkait.</li> <li>5. Mengikuti dan menyukseskan agenda nasional.</li> </ol>	
2.	Bidang Ekonomi	a. Urusan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan upaya pencarian dana guna menunjang kegiatan organisasi Bhayangkari.</li> <li>2. Pengadaan atribut Bhayangkari, barang-barang yang diperlukan organisasi dan anggota.</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan administrasi dibidang ekonomi.</li> </ol>	
		b. Urusan Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan dan meningkatkan kegiatan simpan pinjam.</li> </ol>	

3.	Bidang Kebudayaan	<p>a. Urusan Budaya</p> <p>b. Urusan Pembinaan Mental</p> <p>c. Urusan Pendidikan</p>	<p>2. Meningkatkan anggota untuk sadar menabung.</p> <p>1. Melestarikan nilai budaya bangsa.</p> <p>2. Meningkatkan dan menjaga kelestarian alam serta keindahan lingkungan.</p> <p>3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani.</p> <p>1. Memantapkan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2. Melaksanakan ziarah untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan.</p> <p>3. Membantu dinas Polri dalam sidang Pra Nikah dan masalah keluarga.</p> <p>4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.</p> <p>5. Meningkatkan kesadaran anggota untuk patuh hukum.</p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dibidang organisasi, ekonomi, kebudayaan dan sosial.</p>	
4.	Bidang Sosial	<p>a. Urusan Bantuan Sosial</p> <p>b. Urusan Kesehatan</p>	<p>1. Memelihara dan meningkatkan kesadaran kepedulian sosial, bagi keluarga besar Polri dan masyarakat.</p> <p>2. Bekerja sama dengan Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari untuk pemberian bantuan beasiswa prestasi/kemala, alat bantu, bantuan khusus bilamana diperlukan.</p> <p>1. Bekerja sama dengan Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari dan instansi terkait dalam pemberian bantuan</p>	

5.	<p>Sarana Penunjang:</p> <p>a. Bidang Sekretariat</p>	<p>a. Urusan tata usaha</p> <p>b. Urusan Dalam</p>	<p>kepada Pos KB Kes Terpadu Bhayangkari guna menyukseskan pembangunan kesehatan nasional.</p> <p>2. Berperan aktif dalam program pemerintah.</p> <p>1. Melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi.</p> <p>2. Menyiapkan sarana penunjang untuk mendukung kegiatan pembinaan administrasi umum.</p> <p>3. Penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pendataan dan pemusnahan arsip.</p> <p>1. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua Bhayangkari disemua tingkat kepengurusan.</p> <p>2. Pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana fisik atas persetujuan ketua.</p> <p>3. Memberikan perhatian kepada pengurus dan karyawan.</p> <p>4. Memberikan perhatian kepada organisasi wanita dan instansi terkait.</p>	<p>a. Bidang kesehatan, kependudukan dan KB untuk terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera, menuju keluarga berkualitas 2015.</p> <p>b. Penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta HIV/AIDS menuju Indonesia bebas narkoba 2015.</p>
----	---	--	--	---

	b. Bidang Keuangan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua Bhayangkarindisemua tingkat kepengurusan.</li> <li>2. Melaksanakan pembukuan keuangan sesuai dengan oetunjuk administrasi keuangan Bhayangkari.</li> <li>3. Berkewajiban menyiapkan laporan keuangan.</li> </ol>	
--	--------------------	--	--	--

*Sumber data : Pengurus Bhayangkari Pusat. Tahun 2011*

Rencana kerja Bhayangkari ini disapkan dan disahkan oleh musyawarah Bhayangkari XX tahun 2010 di Jakarta. Apabila ada perubahan sebelum tern\jadinya musyawarah, akan dikeluarkannya surat keputusan yang di sahkan oleh Ketua Umum Bhayangkari.

Jadwal pelaksanaan kegiatan program kerja harus ada koordinasi antara ketua seksi, sekretaris dan bendahara, agar semua kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baikdan tertib.

Telah terlaksananya dari semua kegiatan atau program tanggung jawab yang dimaksud di atas adalah adanya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja. Tujuan dari pembuatan laporan yaitu melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dicapai. Memberikan kesempatan kepada yang menerima laporan untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan saran tindak lanjut.

**Tabel 3.2**  
**Bentuk Laporan Pertanggung Jawaban Program Kerja Bhayangkari**

<b>No.</b>	<b>Yang Melaporkan</b>	<b>Kepada</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Urusan Seksi	Seksi.	
2.	Seksi	Pengurus.	Sehari-hari diwujudkan dalam rapat pengurus inti dipimpin ketua dan wakil ketua.
3.	Pengurus sub anak ranting	Pengurus anak ranting dan Pembina sub anak ranting.	
4.	Pengurus anak ranting	Pengurus ranting dan Pembina anak ranting.	
5.	Pengurus ranting	Pengurus ranting dan Pembina anak ranting.  Pengurus gabungan, pengurus daerah,	

6.	Pengurus cabang	pengurus wilayah dan Pembina cabang.	
7.	Pengurus wilayah	Pengurus daerah dan Pembina. Pengurus pusat, Pembina gabungan, daerah, dan cabang BS.	
8.	Pengurus gabungan, daerah dan cabang BS	Pengurus utama	
9.	Pengurus pusat		

*Sumber data : Bhayangkari Pengurus Pusat, tahun 2011*

Laporan seksi merupakan himpuna dari laporan urusan yang tergabung dalam seksinya, sedangkan laporan pengurus merupakan himpunan dari laporan seksi-seksi. Selain wajibnya para pengurus menyusun laporan juga terdapatnya pengawasan dan pengendalian yang mempunyai fungsi tersendiri. Pengawasan dan pengendalian mutlak diperlukan karena dalam organisasi yang baik harus terselenggara fungsi pengendalian, termasuk didalamnya pengawasan, dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan. Sedangkan maksud dan tujuan dari



pengawasan dan pengendalian sebenarnya tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Oleh karena itu pengendalian mengandung unsur pengambilan keputusan, maka fungsi pengendalian menjadi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh ketua dan wakil ketua, dimaksudkan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan masalah yang timbul berdasarkan masukan dari unsur pembantu pemimpin.

### **C. Bhayangkari Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi**

Secara kuantitas, perempuan di Indonesia berjumlah 101.625.816 jiwa atau menempati 51% dari seluruh penduduk Indonesia.<sup>5</sup> Tetapi, karena konstruksi budaya dalam masyarakat membuat perempuan harus menempati posisi kedua setelah laki-laki. Pembagian kerja berbasis jenis kelamin (*gender based division of labor*) telah melandasi terjadinya stratifikasi gender yang membuat perempuan hanya bekerja di sektor domestik sedangkan laki-laki di wilayah publik. Pekerjaan di sektor domestik seringkali dianggap lebih rendah daripada pekerjaan di wilayah publik, disamping juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi (*unpaid labor*). Oleh karena itu, aktivis perempuan tidak henti-hentinya berjuang untuk meningkatkan kesadaran perempuan yang secara sadar atau tidak sadar telah mengadopsi praktek-praktek patriarki, bahkan perempuan sendiri menerima keadaan tersebut sebagai kodrat (*given*).

Perjuangan aktivis perempuan, sejatinya, telah dimulai jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya organisasi-organisasi

---

<sup>5</sup> BPS, 2000

perempuan yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Misalnya, organisasi Pawijatan Wanito di Magelang yang didirikan pada tahun 1915 dan PIKAT (Perantaraan Ibu kepada Anak Temurun) yang dibentuk di Manado pada tahun 1917. Selain itu, di Surabaya juga ada organisasi perempuan yang dikenal dengan Poetri Boedi sejak didirikan pada tahun 1919 (Suryochondro, 1999:3). Beberapa organisasi perempuan ini, setidaknya, memberikan inspirasi bagi gerakan kaum perempuan yang terus menjamur pada masa selanjutnya, yaitu masa setelah kemerdekaan hingga memasuki Orde Lama.

Perkembangan organisasi perempuan semakin tampak setelah lahirnya Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1945. Kowani merupakan “reinkarnasi” dari organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1928, yaitu Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI). Sayangnya, pada tahun 1965 Kowani menghadapi persoalan yang cukup serius, yaitu pimpinannya memiliki keberpihakan kepada G 30 S/PKI. Namun demikian, keadaan ini telah memunculkan organisasi perempuan baru sebagai bentuk respon atas peristiwa tersebut, yaitu Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (Kawi). Tidak hanya itu, organisasi lain yang juga muncul adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang beraliran komunis (Kompas, 7 Oktober 1999).

Pada masa Orde Lama, selain organisasi juga muncul beberapa nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, antara lain Kartini Kartaradjasa dan Supeni, dua nama yang terkenal dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Tidak hanya

itu, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga memiliki tokoh perempuan yaitu Walandauw. Demikian halnya di Partai Nadhlatul Ulama juga ada nama Mahmuda Mawardi dan HAS Wachid Hasyim. Sementara itu, Salawati Daud merupakan tokoh perempuan terkenal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan perempuan diperhitungkan di panggung politik. Namun, semua itu sirna seiring dengan berakhirnya masa kekuasaan rezim Orde Lama dan berganti dengan Orde Baru.

Masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru merupakan saat yang sulit bagi pergerakan perempuan di Indonesia. Organisasi perempuan dianggap sebagai salah satu elemen yang harus diawasi dan dipasung atas nama kepentingan negara. Salah satu contoh nyata adalah gerakan penghancuran hingga ke akar-akarnya yang dilakukan terhadap Gerwani pada tahun 1965. Penghancuran ini dilakukan dengan cara politik pencitraan hingga di tingkat daerah dimana Gerwani dicitrakan sebagai sekumpulan perempuan kejam yang kerap kali menyilet dan menyiksa para korbannya.

Pada masa Orde Baru, organisasi perempuan disentralisasi oleh negara di bidang “keperempuanan”. Perempuan berperan sebagai istri pendamping suami, pendidik anak dan pembina generasi muda, serta pengatur ekonomi rumah tangga. Walaupun ada perempuan yang bekerja di luar rumah, hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Selain itu, kiprah perempuan di luar rumah juga difokuskan pada

aktivitas sosial dan penyumbang tenaga pada masyarakat. Hal ini, tentu saja, semakin melanggengkan budaya patriarki.

Salah satu organisasi yang terkenal pada masa itu adalah Dharma Wanita yang berdiri pada tahun 1974 dan dikenal sebagai organisasi istri pegawai negeri. Organisasi ini juga terkenal dengan programnya yang disebut PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Demikian halnya dengan istri-istri ABRI juga tergabung dalam organisasi sesuai dengan bidang suaminya, antara lain Persit (Persatuan Istri Tentara) Candra Kirana bagi istri angkatan darat, Jalasenastris untuk istri angkatan laut, PIA Ardhya Garini bagi istri angkatan udara, dan Bhayangkari untuk istri anggota Polri.

Namun demikian, pada tahun 1980-an banyak bermunculan organisasi perempuan yang mencoba untuk keluar dari rumusan peran Orde Baru, diantaranya Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta dan Yayasan Kalyanamitra di Jakarta. Yayasan ini bahkan memiliki jaringan hingga ke LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yakni LSM Solidaritas Perempuan dan LSM Rifka Annisa. Perjuangan aktivis perempuan pada masa ini tidaklah mudah sebab di satu sisi mereka harus mengubah *mindset* kaum perempuan terhadap kesetaraan gender, dan di sisi lain mereka juga harus berhadapan dengan negara yang memiliki rumusan peran perempuan yang berbeda dengan perjuangan mereka.

Keberadaan organisasi perempuan semakin mendapat tempat seiring dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Perjuangan aktivis perempuan untuk

memperjuangkan hak kaum perempuan yang selama ini dipasung oleh pemerintah atas nama kepentingan negara semakin terbuka lebar. Organisasi perempuan terus bermunculan dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk ormas, yayasan, dan LSM, melainkan juga dalam bentuk *women crisis center* dan *hotline*. Tidak hanya itu, partai politik pun tidak ketinggalan memasukkan unsur perempuan ke dalam bidang organisasinya maupun sayap organisasi yang dipimpin langsung oleh perempuan. Misalnya, Partai Golkar memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki Wanita Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki Perempuan Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan (DUPP), Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki Perempuan Amanat Nasional, dan masih banyak lagi.

#### **D. Penutup**

Bidang pemberdayaan Bhayangkari banyak membantu anggotanya dalam mengasah kemampuan para anggota Bhayangkari. Dari berbagai macam bidang Bhayangkari mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan para anggota dan masyarakat dengan cara memberikan pemberdayaan. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Bhayangkari. Seperti contohnya, kegiatan berupa kunjungan-kunjungan ke panti-panti, pelatihan pembentukan *skill* (keahlian), pelatihan *table manner* dan hal lainnya. Hal ini dilakukan melalui serangkaian susunan rencana yang dibentuk oleh kepengurusan.